

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH
DASAR DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**

Oleh :

Ega Aditya Alfa Riqi, Tri Yuniningsih

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Sudharto S. H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Program Indonesia Pintar, hereinafter referred to as PIP or The Smart Indonesia Program, is government cash assistance provided to students whose parents are not and / or less able to pay for their education. The method used in this research is descriptive qualitative method. The purpose of this research is to see how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in Tembalang District Elementary Schools and to analyze the factors that influence its implementation by using the effectiveness of policy implementation through Riant Nugroho's "five right", namely: First policy accuracy, accuracy of implementation, Accuracy of targets, Accuracy of Environment and Accuracy of Process. The recommendation given is that the implementing agency should be more responsible for coordinating junior secondary schools and distribution banks, to be able to pay attention to the human resources involved in this program so that they are more adequate not only in quantity but also in quality, the implementing agency must be able to act firmly and strict on violations that occur, for the social environment, especially parents of the beneficiary Indonesia Pintar Program, must be better understood and comply with the provisions and technical programs of Indonesia Pintar.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program, Students Elementary School.

Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 28B (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 menyatakan ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus memberikan akses pendidikan pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat keluarga miskin mengabaikan kebutuhan akan pendidikan. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar Nomor 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya,

Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang 2015

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015

No	Kecamatan	Rawan Miskin	Miskin	Sangat miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Semarang Barat	39.265	4.372	-
2	Semarang Utara	34.667	8.223	17
3	Tembalang	29.499	4.395	7
4	Genuk	21.170	3.367	4
5	Ngaliyan	18.803	2.027	4
6	Semarang Timur	18.487	3.092	8
7	Gunung Pati	17.251	2.621	-
8	Candisari	20.369	4.061	-
9	Gayamsari	19.826	2.376	-
10	Pedurungan	23.531	2.164	-
11	Semarang Selatan	23.531	2.861	-
12	Banyumanik	12.834	2.245	-
13	Mijen	10.836	3.932	15
14	Semarang Tengah	12.039	5.576	48
15	Gajah Mungkur	14.196	1.365	-
16	Tugu	9.527	1.401	5
Jumlah		Jumlah Jiwa: 373.978		

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Semarang Barat sebesar 43.637 jiwa, diikuti Semarang Utara sebesar 42.907 jiwa, dan Tembalang sebesar 33.901 jiwa. Berdasarkan data keluarga miskin tersebut penulis mengambil lokasi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Kecamatan Tembalang. Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga miskin terbesar ketiga setelah kecamatan Semarang Barat dan Utara.

Apabila dilihat dari data yang diperoleh, jumlah kesejahteraan sosial di Kota Semarang khususnya usia Sekolah Dasar di kecamatan Tembalang merupakan yang paling rendah angka partisipasinya

Tabel 1.2 Jumlah Anak Tidak Bersekolah Menurut Kecamatan dan Kelompok Usia Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah Kota Semarang

Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah			
		Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	Total
Semarang Utara	120	100	198	670	968
Tembalang	070	109	175	593	877
Semarang Barat	140	100	109	478	687
Genuk	090	60	98	505	663
Semarang Timur	110	86	130	436	652
Pedurungan	080	91	109	448	648
Gayamsari	100	86	130	436	604
Mijen	010	92	80	362	534
Gunungpati	020	33	87	366	486
Banyumanik	030	54	67	355	476
Semarang Tengah	130	30	63	270	363
Candisari	060	39	63	258	360
Ngaliyan	160	43	53	257	353
Semarang Selatan	050	30	39	207	267
Tugu	150	16	26	90	132
Gajahmungkur	040	9	19	90	118
		990	1,431	5,776	8,197

Sumber: Basis Data Terpadu 2015

Selanjutnya, Berdasarkan tabel di atas jumlah anak yang tidak bersekolah secara keseluruhan berjumlah 8197 siswa. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan rentang usia 7-12 tahun masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah. Kecamatan Tembalang sendiri memiliki jumlah anak tidak bersekolah usia 7- 12 tahun sebanyak 109 siswa, semarang utara 100 siswa, dan semarang barat 100 siswa, dan yang terendah adalah gajahmungkur sebesar 9 siswa. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang tidak bersekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk Kecamatan Tembalang tertinggi dibandingkan beberapa kecamatan lainnya.

Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan program PIP di Kecamatan Tembalang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

D. Teori

1. Administrasi Publik

Menurut *Nicholas Henry* (dalam Pasolong, 2007), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

2. Kebijakan Publik

Wilson (dalam Wahab, 2012: 13) kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

3. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

4. Keefektifan 5 Tepat Riant Nugroho

Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu (Nugroho, 2014:686-688):

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menyangkut seberapa jauh kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan bagaimana kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah, swasta maupun masyarakat.

b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu actor

implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan. Kedua adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Ketepatan Target

c. Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan apakah implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mungkin sama tidak efektifnya dengan kebijakan lain. Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan oleh implementor dan adanya intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan kebijakan lain yang dilaksanakan oleh implementor sehingga menimbulkan ketidakefektifan.

d. Ketepatan Lingkungan Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal

kebijakan, dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga startegis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.

E. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian eksploratif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Tipe penelitian eksploratif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti.

1. Situs Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembalang. Untuk melengkapi data primer yang diperlukan, peneliti juga melakukan

penelitian data sekunder pada instansi-instansi terkait yang menangani program PIP

a. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung melalui subjeknya. Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan.

a. Data Sekunder

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui Data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang berupa bahan-bahan bacaan yang relevan.

b. Informan

Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* ialah suatu metode atau cara pemilihan informan dimana peneliti memilih *key person* sebagai objek yang akan diteliti. Adapun *key person* tersebut ialah Dinas Pendidikan, UPTD Kecamatan, Sekolah Dasar, LSM terkait, serta target kebijakan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

- d. Instrumen Penelitian
Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri.
- e. Teknik Analisis dan Interpretasi Data
Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif,

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Kecamatan Tembalang

Dapat kebijakan yang merupakan penetapan sasaran Program melalui sekolah yang kini diubah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selanjutnya rumah tangga memiliki anak-anak berusia sekolah dapat membawa KIP tersebut ke Sekolah untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat Program PIP.

Kebijakan ini bermula saat presiden Joko Widodo menunaikan janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan agar membawa dampak pendidikan anak pada keluarga miskin dan rentan miskin. Pencapaian keberhasilan dari Program PIP ini untuk seluruh keluarga miskin bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan, tidak boleh ada tebang pilih dalam melaksanakannya.

Jumlah anak yang tidak bersekolah secara keseluruhan berjumlah 8197 siswa. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan rentang usia 7-12 tahun masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah. Kecamatan Tembalang sendiri memiliki jumlah anak tidak bersekolah usia 7- 12 tahun sebanyak 109 siswa, Semarang utara 100 siswa, dan Semarang barat 100 siswa, dan yang terendah adalah Gajahmungkur sebesar 9 siswa. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang tidak bersekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk Kecamatan Tembalang tertinggi dibandingkan beberapa kecamatan lainnya.

B. Indikator Lima Tepat Riant Nugroho dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal- hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686). Apakah Kebijakan Program Indonesia Pintar dapat membiayai kebutuhan personal dan diharapkan mampu membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop out). Karakteristik Program PIP adalah berupa bantuan dana kepada siswa untuk membiayai kebutuhan pribadi siswa sehingga harus transparan tugas dan masing-masing fungsi dari lembaga yang terlibat kerjasama untuk menyukseskan kebijakan tersebut

2. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan informasi yang di dapat dari proses wawancara mengenai keweangan aktor yang menjalankan kebijakan Program Indonesia Pintar adalah dinas pendidikan kota dan sekolah. Namun terdapat juga aktor yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar adalah LSM dan Dewan Pendidikan yang mempunyai peran dalam mengontrol; dan RT, RW sampai kecamatan setempat yang memberikan surat keterangan tidak mampu yang dapat digunakan sebagai usulan calon penerima bantuan.

3. Ketepatan Target

Realisasi dilapangan dalam penggunaan dana Program Indonesia Pintar orang tua yang lebih memiliki kepentingan, seperti dibelikan beras maupun beli sepeda.

Fenomena ketepatan target dapat kita lihat bahwa penerima Program Indonesia Pintar lebih mengedepankan pemegang KKS dalam menyeleksi penerima bantuan. Di dalam penggunaan dana tersebut pemberian pemahaman kepada kelompok sasaran akan kegunaan bantuan tersebut sangat penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

bersekolah.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini melihat interaksi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. interaksi yang dilakukan tidak hanya dengan pelaksana saja, tetapi dengan kelompok sasaran sehingga pelaksana dapat menggunakan strategi yang tepat dalam mengintervensi kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Program Indonesia Pintar bisa dilihat melalui pemahaman dari kelompok sasaran. Pemahaman kelompok sasaran akan Program Indonesia Pintar melalui orang tua murid yang di panggil ke sekolah untuk di berikan arahan jalan dengan menggunakan bahasa sederhana bahwa dana ini untuk memberikan alat-alat sekolah, tasnya rusak, sepatunya jebol, dan klambi. Namun pemahaman masyarakat berbeda - beda tergantung kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat itu.

Kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi pola pikir masyarakat akan menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu penggunaan dana tersebut ada yang digunakan untuk membelikan peralatan sekolah dan ada yang digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membeli beras.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di Kecamatan Tembalang.

1. Ketepatan Kebijakan

- a. Kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah.

- b. Rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikan tersebut karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya,

- c. Tingginya angka putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir

Dengan melihat karakter permasalahan yang ada, maka dikeluarkannya kebijakan Program Indonesia Pintar mampu memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Kebijakan Program Indonesia Pintar bentuk kompensasi yang diberikan untuk biaya untuk memenuhi kebutuhan personal siswa. Dengan pemberian dana tersebut dapat membuat siswa miskin terus bersekolah sehingga mencegah drop out.

2. Ketepatan Pelaksana

Aktor	Peran
Kepala Bagian Bidang Monitoring Dan Pengembangan, Dinas Pendidikan Kota Semarang	<i>Implementator</i> <i>Policy Creator</i>
Kepala UPTD Kecamatan Tembalang	<i>Koordinator</i>
Kepala Sekolah Sd Bulusan, Kecamatan Tembalang	<i>Fasilitator</i>
LSM/NGO Pattiro	<i>Fasilitator</i>
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang	<i>Fasilitator</i>
Wali Murid Penerima Manfaat PIP	<i>Fasilitator</i>

Berdasarkan ketepatan tugas yang diberikan kepada pelaksana kebijakan untuk memahami isi kebijakan terdapat dalam juknis. Pemahaman isi kebijakan oleh para pelaksana diberikan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis guna menambah kompetensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan Program Indonesia Pintar. Akan tetapi karena kesesuaian dengan juknis yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut masih terdapat kendala yang belum dapat dikendalikan oleh pelaksana.

3. Ketepatan Target

pelaksanaannya diprioritaskan untuk pemegang KKS dalam mendapatkan Program Indonesia Pintar tersebut. Pemegang KKS sebagian besar tidak tergolong kriteria kategori miskin karena memiliki kondisi rumah bertembok dan beralas keramik.

Kendala yang muncul akibat pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah kelompok sasaran sudah mengambil uang atau belum tidak tau dan penggunaan uang tersebut untuk apa juga tidak tau sehingga kelompok sasaran yang menerima bantuan tersebut tidak ada perubahan.

4. Ketepatan Lingkungan

Fenomena ketepatan lingkungan ini melihat hubungan keterkaitan lembaga pelaksana, persepsi *stakeholder*, dan

sumber otoritas. Keterkaitan lembaga dalam menjalankan kebijakan dapat dilihat dari interaksi dalam melakukan koordinasi kebijakan. Persepsi *stakeholder* baik individu maupun lembaga mengenai kebijakan yang baik harus dilakukan terus menerus. Sumber otoritas ini melihat intruksi yang diberikan pembuat kebijakan dalam menjalankan kebijakan Program Indonesia Pintar.

5. Ketepatan Proses

Berdasarkan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Program Indonesia Pintar berbeda-beda. Kesiapan masyarakat dalam menjalankan tergantung dari pemahaman dari kelompok sasaran. pemahaman kelompok sasaran dalam memahami pemberian dana tersebut dipengaruhi pola pikir. Pola pikir kelompok sasaran dalam memahami kebijakan tersebut tergantung dari kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah dalam bidang pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan dari Kebijakan Program Indonesia Pintar sesuai dengan Panduan PIP adalah sebagai berikut: menambah dan memperluas jumlah sasaran agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai dan meningkatkan jumlah nominal PIP untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan. Agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai maka diperlukan pelaksanaan kebijakan yang sistematis.

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai berikut:

a. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan dalam kebijakan PIP dinilai tepat tapi masih belum tepat terutama bila dilihat dari masih adanya siswa usia sekolah yang drop out, sedangkan tujuan utama program ini adalah untuk mengentaskan siswa yang drop out akibat tidak memiliki biaya untuk fasilitas bersekolah.

b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan PIP yang diberikan yaitu didalam melaporkan data dan menyampaikan realisasi penggunaan dana belum tepat dalam pelaporan dan pendistribusian data dari sekolah ke dapodik.

c. Ketepatan Target

Bahwa target kebijakan PIP adalah semua keluarga miskin. Namun pelaksanaannya lebih diprioritaskan kepada pemegang KKS dan sebagian pemegang KKS tidak termasuk kriteria miskin. Intervensi belum maksimal karena pemberian informasi tidak utuh, hanya besarnya dana pengenalan penggunaan dana

d. Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan ketepatan lingkungan sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan PIP bila dilihat dari keterkaitan lembaga pelaksana dengan lembaga lain, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan, dan sumber otoritas. Ketepatan lingkungan ada 2 aspek yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi pemangku kebijakan seperti Dinas Pendidikan, UPTD Kecamatan, Pegawai Sekolah Dasar yang menangani PIP, sedangkan lingkungan Eksternal meliputi LSM/NGO.

e. Ketepatan Proses

Berdasarkan ketepatan proses dalam implementasi kebijakan PIP masih belum optimal terutama kesiapan kelompok sasaran. Hal ini disebabkan pengkategorian siswa yang berhak mendapat bantuan PIP tersebut masih kurang merata dan tepat sasaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, diantaranya adalah:

1. Ketepatan Kebijakan

Melakukan monitoring atau pendampingan dalam PIP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyediakan mekanisme tersendiri kepada kelompok sasaran yang menerima bantuan sesuai prinsip keadilan dan pemerataan agar siswa yg drop out bisa kembali bersekolah.

2. Ketepatan Pelaksana

Di dalam menjalankan tugas pelaksana dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana, maka diperlukan kewenangan untuk mengendalikan penggunaan dana PIP.

3. Ketepatan Lingkungan

Agar penerimaan Program Indonesia Pintar tepat sasaran dan intervensi

pemberian informasi yang utuh kepada kelompok sasaran agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan.

4. Ketepatan Target

Kompetensi pelaksana kebijakan dalam memberikan kejelasan informasi kepada kelompok target sasaran bagaimana kriteria penerima bantuan, kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait seperti BPS dalam membuat kategori bantuan PIP.

5. Ketepatan Proses

Kesiapan kelompok sasaran dengan kondisi sosial yang lemah perlu diperlakukan khusus dalam penggunaan dana tersebut dengan cara komite sekolah sesekali mengunjungi kelompok sasaran untuk menanyakan penggunaan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Keban, Yeremis T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Renaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono, A.G. 2012. *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Semarang.

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal/Skripsi

Handayani, Fitri dan Warsono, Hardi. 2017. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang". *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017

Riska, Illiya Arina. 2018 *Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus*. *Journal Policy And Management Review* Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018

Pertiwi, Yoani Mega. 2014 *Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Pada Sekolah Dasar Negeri (Sd) Di Jakarta Timur Wilayah II*

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008 Perihal Pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017.

Internet

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>

Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartuindonesia-pintar-kip/>, diakses 27 Februari 2017.